

# Materi Diskusi Penyusunan LKPJ Kabupaten Nagekeo



Dr. Wahyudi Kumorotomo  
Magister Administrasi Publik  
Universitas Gadjah Mada

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

[kumoro@map.ugm.ac.id](mailto:kumoro@map.ugm.ac.id)

Telp: 081 328 488 444

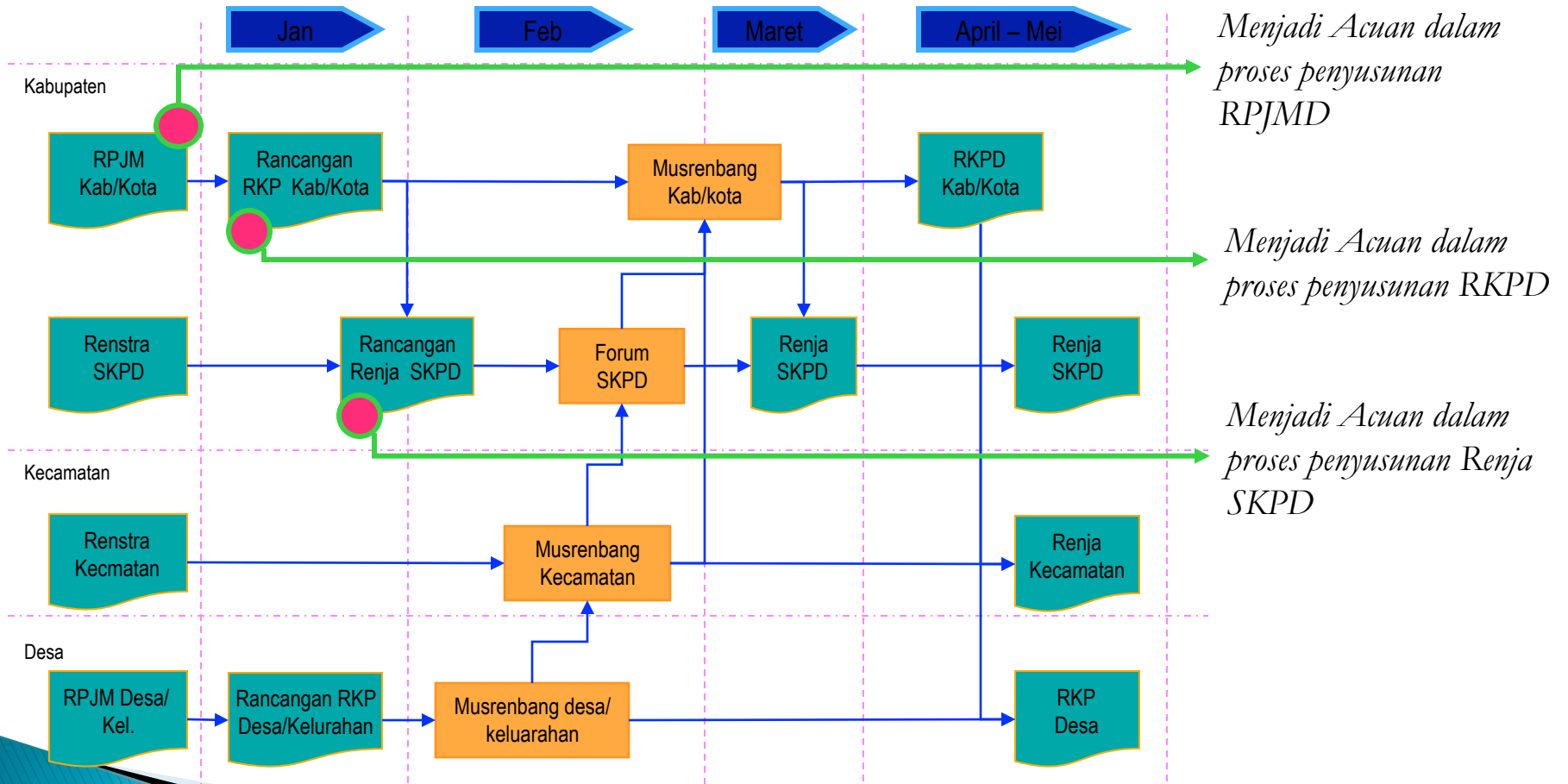
# “Triple Accountability” (PP 3/2007)

1. Bupati wajib menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), ditujukan kpd Mendagri melalui Gub;
  1. 26 urusan wajib
  2. 8 urusan pilihan
  3. Urusan desentralisasi
2. Bupati wajib menyusun LKPJ (Lap Keterangan Pertanggungjawaban) untuk DPRD;
  1. LKPJ akhir tahun anggaran
  2. LKPJ akhir masa jabatan
  3. Tidak ada ket diterima/ditolak (?)
3. Bupati wajib memberi Informasi LPPD kepada masy melalui media cetak/ elektronik;
  1. Mengapa materinya sama dg LPPD (pasal 27)?
  2. Informasi kepada publik seharusnya selengkap mungkin (berbagai media), tanggapan masy dibuka seluas mungkin.

# Apa yg potensial dikembangkan?



# Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah



# Masalah Umum dalam Rencana Pembangunan Daerah: visi tidak menunjukkan prinsip SMART


SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-Bound

## Visi Pembangunan Kab Nagekeo:

1. Mengembangkan pemerintahan wirausaha dan pelayanan yang berkeadilan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang berorientasi wirausaha, mandiri dan berkelanjutan dalam semangat kebersamaan dan solidaritas.
3. Menumbuh-kembangkan ekonomi rakyat berbasis desa dan kawasan cepat tumbuh.
4. Mengembangkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat



# Program Umum Pembangunan Kab Nagekeo (Menurut RPJMD)

1. Mengembangkan pemerintahan wirausaha dan pelayanan yang berkeadilan.
  2. Mengembangkan sumber daya manusia yang beroreantasi wirausaha, mandiri dan berkelanjutan dalam semangat kebersamaan dan solidaritas.
  3. Menumbuh-kembangkan ekonomi rakyat berbasis desa dan kawasan cepat tumbuh.
  4. Mengembangkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 

# Contoh Rumusan Sasaran Pembangunan Daerah yg SMART

1. Kemiskinan turun, kesempatan kerja meningkat
2. Infrastruktur semakin baik (listrik 90% RT, jembatan Kali Putih, Sewon, 20 m; Kembangsari, Piyungan, 30 m)
3. Kesenjangan berkurang (Indeks Gini turun, 0,2474 th 2007 → 0,1973 th 2010)
4. Kualitas hidup masy meningkat (HDI menjadi 76)
5. Lingkungan hidup (rehab 2.000 Ha lahan kritis)
6. Kapasitas pemerintah daerah (SDM meningkat 10%, keuangan daerah 10%)
7. Partisipasi masyarakat dan swasta (Pemilu 83%; investasi swasta naik 10%).

# APBD Kab Nagekeo Th 2011

Uraian		Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
<b>Total Pendapatan</b>		332,418	95.41
	Pendapatan Asli Daerah	13,344	3.83
	Dana Perimbangan	315,070	90.43
	Dana Alokasi Umum	251,102	72.07
	Dana Alokasi Khusus	49,540	14.22
	Pajak Daerah	1,462	0.42
	Lain-lain Pendapatan	7,504	2.15
<b>Total Belanja</b>		348,418	100.00
Belanja Tidak Langsung		140,484	40.32
	Belanja pegawai	132,350	37.99
	Hibah	1,358	0.39
	Bantuan sosial	5,775	1.66
	Bantuan keuangan	-	0.00
	Belanja tidak terduga	1,000	36.36
Belanja Langsung		207,935	59.68
	Belanja pegawai	26,128	7.50
	Belanja barang & jasa	94,514	27.13
	Belanja modal	87,292	25.05
Pembiayaan Daerah		16,000	4.59
	SiLPA	18,484	5.31
	Pengeluaran	2,750	0.79
<b>Defisit</b>		(16,000)	-4.59



# Kondisi Ekonomi Makro Daerah

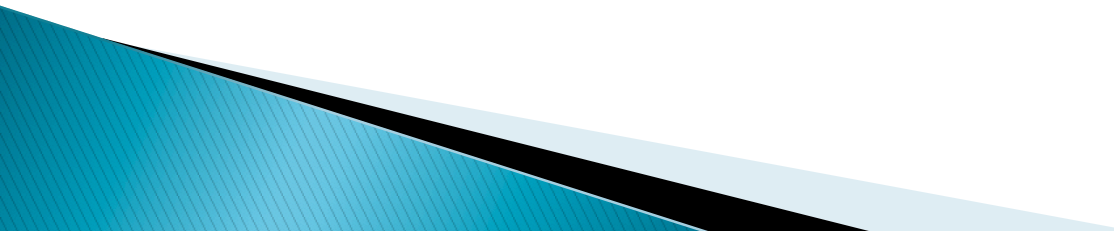
Th	Kemiskinan (%)	Pengangguran (%)	Pertumbuhan ekonomi (%)	PDRB (Rp. M)	Investasi (Rp. M)	PAD (Rp. M)
2006	35,05	8,95	2,02	3.299	638	38,4
2007	28,11	8,54	4,88	3.481	749	42,8
2008	26,04	8,15	5,35	3.646	842	45,5
2009	24,11	7,78	5,47	3.845	934	49,4
2010 *	21,90	7,42	5,58	4.060	1.026	52,9

\* Prediksi RPJMD

# Pagu Indikatif RKPD 2010

No.	SKPD	Pagu Indikatif	Pos Bantuan	Total
1	Pendidikan dasar	30.424.543.000	6.040.000.000	36.464.543.000
2	Pend Men.Non-formal	13.323.653.000		13.323.653.000
3	Kepend. & Capil	1.442.895.500		1.442.895.500
4	Perindagkop	2.541.556.500	544.185.000	3.085.741.500
5	Nakertrans	1.667.516.100	885.622.000	2.553.138.100
6	Kesehatan	17.307.214.125	3.185.400.000	20.492.614.125
7	Kelautan & PP	536.696.000		536.696.000
8	Perhubungan	1.143.890.820		1.143.890.820
9	Pertanian & Kehut.	6.318.300.000		6.318.300.000
10	Pekerjaan Umum	96.935.830.000		96.935.830.000
11	Sumberdaya air	12.668.504.200		12.668.504.200
12	Kebud & Par	2.890.008.050	500.000.000	3.390.008.050
13	Sosial	1.236.271.605	12.734.450.000	13.970.721.605
14	Perijinan	804.937.500		804.937.500
15	PKAD	79.337.034.525	2.520.000.000	81.857.034.525

# Format LKPJ & ILPPD

- I. Gambaran umum
  - II. Kebijakan umum pengelolaan keuangan
  - III. RPJMD
  - IV. Urusan desentralisasi
    - A. Prioritas urusan wajib
    - B. Prioritas urusan pilihan
  - V. Tugas pembantuan
  - VI. Tugas umum pemerintahan
- 

# Urusan Wajib (26)

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Lingkungan hidup
4. Pekerjaan umum
5. Penataan ruang
6. Perencanaan pembangunan
7. Perumahan
8. Kepemudaan dan olah-raga
9. Penanaman modal
10. Koperasi dan UKM
11. Dukcapil
12. Ketenagakerjaan
13. Ketahanan pangan
14. Pembr. Perempuan & lind. anak
15. KB & keluarga sejahtera
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan informasi
18. Pertanahan
19. Kesatuan bangsa & politik DN
20. Otda, PUM, adm keu, kepeg, dll
21. Pemberdayaan masy. desa
22. Sosial
23. Kebudayaan
24. Statistik
25. Kearsipan
26. Perpustakaan

# Urusan Pilihan (Maks. 8)

1. Pertanian
2. Pariwisata
3. Industri
4. Perdagangan
5. Transmigrasi



→ Apa sektor yang penting di Nagekeo?

# Tugas Umum Pemerintahan

1. Kerjasama antar-daerah dan lembaga pem
2. Kerjasama dg lembaga non-pemerintah
3. Koordinasi dg instansi vertikal di daerah
4. Pembinaan batas wilayah
5. Pencegahan & penanggulangan bencana
6. Penyelenggaraan ketertiban umum.

→ Apa masalah pokok di Nagekeo?



# Bagaimana realisasi program ini?

1. Dukungan kebijakan untuk mengakses Obyek Wisata Nagekeo.
2. Pembangunan BLK untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.
3. Pengembangan Kawasan Ngulukedha (1.800 Ha) sebagai kawasan pengembangan baru, dengan pola pertanian terpadu
4. Pengembangan wilayah dan pemerataan penyebaran penduduk pada lokasi Translok Ngulukedha.
5. Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan (Budidaya Tripang, Rumput Laut, Rumpon, Mutiara, Ikan Keramba dan Koperasi Nelayan.
6. Pembangunan pangkalan TPI.
7. Dukungan kebijakan dan dana Pusat untuk membuka dan mengembangkan pelayanan Jasa Telekomunikasi, peningkatan kapasitas tegangan listrik PLN.
8. Dukungan dana Pusat guna pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut Kelas V Marapokot dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kapet Mbay.

LKPJ adalah bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, bukan hanya kepada DPRD.  
Rakyat Nagekeo menanti manfaat dari program Pemerintah Kabupaten.

Benarkah?

“Putera–puteri Nagekeo terpelajar dibiarkan menonton dari jauh sambil kerja “mboo mea” (hanya mengenyangkan perut sendiri).  
Ketika ingin kembali dan mengabdikan diri di Nagekeo, ditolak oleh warganya sendiri.”

TERIMA KASIH